

**TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERANAN BADAN
KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) UNTUK
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SESUAI DENGAN
KEPRES NO. 64 TAHUN 1985**

(Study Kasus Pada Kantor BKKBN Kota Medan)

S K R I P S I

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

Oleh

ASMA

No. Stambuk : 97.840.0112.

N I R M : 9711086000111.

Bidang : Hkm Adm Negara



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
2001**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI :

1. PENULIS :

N a m a : A S M A
No. Sth/NIRM : 97.840.0112/9711086000111.
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG PERANAN BADAN KOORDINASI
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
(BKKBN) UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SESUAI DENGAN
KEPPRES NO. 64 TAHUN 1983 (Study Kasus
Pada Kantor BKKBN Kota Medan)

2. PEMBIMBING SKRIPSI :

1. N a m a : HJ. RAHMANIAR, SH. M. HUM.

Tgl persetujuan : 15/08 - 2001.

Tanda tangan : 

2. N a m a : TAUFUK SIREGAR, SH. M. HUM.

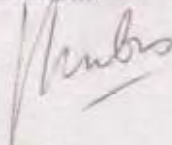
Tgl persetujuan : 1 - 12 - 2001

Tanda tangan : 

Disetujui Oleh

Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Univ Medan Area



(HJ. RAHMANIAR, SH. M. HUM)

acc. dipertanggungjawabkan
Untuk Skripsi
Rubis

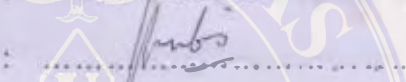
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

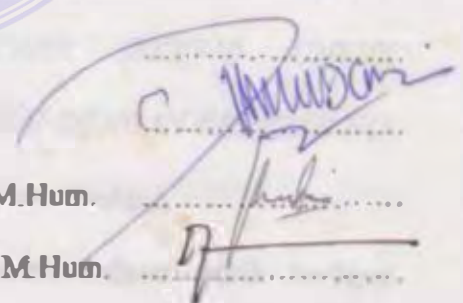
N A M A : A S M A
NO. STAMBUK/NIRM : 97.840.0112 / 97.1108600.0111
BIDANG : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : TINAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
TENTANG PERANAN BADAN KOORDINASI
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
(BKKBN) UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SESUAI DENGAN
KEPPRES NO.64 TAHUN 1983 (Study Kasus pada
Kantor BKKBN Kota Medan).

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. **N A M A** : HJ. RAHMANIAR, SH, M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : 10 SEPTEMBER 2001
TANDA TANGAN : 

2. **N A M A** : TAUFIK SIREGAR, SH, M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : 10 SEPTEMBER 2001
TANDATANGAN : 

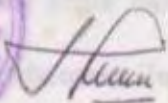
III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :

J A B A T A N	N A M A	TANDA TANGAN
1. Ketua	T. MANSYURDIN, SH	
2. Sekretaris	ZAMZAM, SH	
3. Penguji I	HJ. RAHMANIAR, SH, M.Hum.	
4. Penguji II	TAUFIK SIREGAR, SH, M.Hum.	

DIKETAHUI OLEH :



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area



UNIVERSITAS MEDAN AREA (H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum)

Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum UMA



(Hj. Rahmaniar, SH, M.Hum.)

ABSTRAKSI

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERANAN BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SESUAI DENGAN KEPPRES NO. 64 TAHUN 1983

(Study Kasus Pada Kantor BKKBN Kota Medan)

Oleh :

ASMA

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki masalah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, apabila pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut tidak segera ditekan maka akan mengganggu seluruh program pembangunan nasional yang telah digawiskan sebelumnya. Sesuai dengan Tujuan Nasional yang tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain menyebutkan : "... Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka program pemerintah harus dapat mengarah kepada tujuan yang akan dicapai tersebut, sesuai dengan hal tersebut di atas salah satunya adalah program Keluarga Berencana (KB), sebab dengan Keluarga

Berencana dapat menekan angka kelahiran dan dapat mengontrol kesehatan Ibu dan anak sesuai dengan yang dikehendaki.

Untuk melaksanakan program tersebut pemerintah melalui Keppres No. 64 Tahun 1983 membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dari tingkat pusat sampai di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia.

BKKBN Kota Medan salah satu aparat yang berwenang melaksanakan program Keluarga Berencana, berupaya senantiasa untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan, untuk dapat mencapai target tersebut maka BKKBN Kota Medan mengadakan kerja sama dengan beberapa instansi dan lembaga masyarakat yang ada di Kota Medan, sebab dengan kerja sama tersebut dapat diharapkan angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga peserta KB dengan beberapa program ke arah itu.

Pembinaan keluarga berencana ini tidak hanya terbatas pada pembinaan ibu dan anak semata, akan tetapi perkembangan anak tersebut dibina sampai anak tersebut mencapai usia remaja, sebab perkembangan usia anak pada saat remaja adalah merupakan masa yang sangat rawan dan harus perlu diperhatikan oleh Pemerintah.

KATA PENGANTAR

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG

Terlebih dahulu penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmad, taufiq, hidayah dan inayahNya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Juga teriring salam dan shalawat diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada penulis kepada agidah yang murni yaitu Agama Islam.

Skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi tugas akhir untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Bertitik tolak dari tugas tersebut, maka penulis memilih pembahasan dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERANAN BADAN KOORDINASI KELAURGA BERENCANA (BKKBN) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SESUAI DENGAN KEPPRES NO. 64 TAHUN 1983 (Study Kasus Pada Kantor BKKBN Kota Medan).

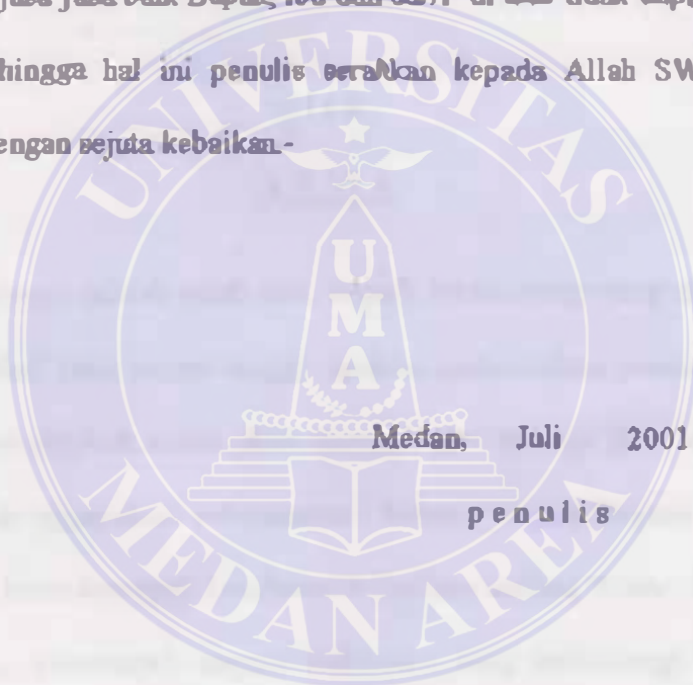
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan baik dari segi penguasaan materi, analisa masalah maupun pada susunan tata bahasanya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya konstruktif guna tercapainya kebenaran ilmiah.

Dalam kesempatan ini penulis merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis, baik pada masa perkuliahan maupun pada saat penulisan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Kepada ~~suami~~ tercinta, ~~suanda~~, dan ~~saudara-saudara~~ lainnya, yang telah banyak memberikan dorongan pada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak H. Ghulam Muhammad, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Hj. Rahmaniar, SH, M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I pada penulisan skripsi ini, yang telah banyak membantu dan mengarahkan tata penulisan skripsi yang benar, terutama dalam hal materi penulisannya.
4. Bapak Taufik Siregar, SH. M. Hum sebagai Dosen Pembimbing II pada penulisan skripsi ini, yang telah banyak membantu dan mengarahkan tata penulisan skripsi yang benar, terutama dalam hal metode penulisannya.
5. Pimpinan Kantor BKKBN Kota Medan beserta seluruh staff, yang telah banyak memberikan data-data pada penulisan skripsi ini, sehingga data-data yang ditampilkan lebih akurat.
6. Seluruh Staff Dosen, Administrasi dan pihak lainnya dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak membantu penulis hingga berakhirnya perkuliahan penulis.

7. Seluruh teman penulis yang telah bersama-sama mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, semoga hubungan kekeluargaan selama ini dapat berlangsung sampai akhir hayat kita.
8. Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, akan tetapi telah membantu penulis, dalam kesempatan ini juga penulis ucapkan terima kasih.

Dimana jasa-jasa baik Bapak ibu dan sd/i di atas tidak dapat penulis balas sepenuhnya, sehingga hal ini penulis serahkan kepada Allah SWT yang kelak membalasnya dengan sejuta kebaikan -



(A S M A)

ABSTRAKSI

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERANAN BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SESUAI DENGAN KEPPRES NO. 64 TAHUN 1983

(Study Kasus Pada Kantor BKKBN Kota Medan)

Oleh:

ASMA

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki masalah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, apabila pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut tidak segera ditekan maka akan mengganggu seluruh program pembangunan nasional yang telah digawiskan sebelumnya. Sesuai dengan Tujuan Nasional yang tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain menyebutkan : "... Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka program pemerintah harus dapat mengarah kepada tujuan yang akan dicapai tersebut, sesuai dengan hal tersebut di atas salah satunya adalah program Keluarga Berencana (KB), sebab dengan Keluarga

Berencana dapat menekan angka kelahiran dan dapat mengontrol kesehatan Ibu dan anak sesuai dengan yang dikehendaki.

Untuk melaksanakan program tersebut pemerintah melalui Keppres No. 64 Tahun 1983 membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dari tingkat pusat sampai di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia.

BKKBN Kota Medan salah satu aparat yang berwenang melaksanakan program Keluarga Berencana, berupaya senantiasa untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan, untuk dapat mencapai target tersebut maka BKKBN Kota Medan mengadakan kerja sama dengan beberapa instansi dan lembaga masyarakat yang ada di Kota Medan, sebab dengan kerja sama tersebut dapat diharapkan angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga peserta KB dengan beberapa program ke arah itu.

Pembinaan keluarga berencana ini tidak hanya terbatas pada pembinaan ibu dan anak semata, akan tetapi perkembangan anak tersebut dibina sampai anak tersebut mencapai usia remaja, sebab perkembangan usia anak pada saat remaja adalah merupakan masa yang sangat rawan dan harus perlu diperhatikan oleh Pemerintah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKSI SKRIPSI	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Methoda Pengumpulan Data	8
BAB II : HUBUNGAN HUKUM ADMINSTRASI NEGARA DENGAN BKKBN UNTUK MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT	10
A. Tinjauan Tentang Hukum Administrasi Negara	10
B. Kesejahteraan Masyarakat Menurut Undang-undang yang Berlaku	15
C. Program Keluarga Berencana Sebagai Sarana Dalam Mensejahterakan Masyarakat	18

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA BERENCANA	22
A. Perkembangan Keluarga Berencana di Indonesia	22
B. Keluarga Berencana dan Kependudukan di Indonesia	26
C. Peranan BKKBN Dalam Pelaksanaan KB	29
D. Hubungan BKKBN Dengan Kesejahteraan Masyarakat	35
BAB IV : PERANAN BKKBN KOTA MEDAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI KOTA MEDAN	42
A. Struktur Organisasi BKKBN Kota Medan	42
B. Upaya-upaya BKKBN Kota Medan Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana	51
C. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan KB	55
D. Penyelesaian Masalah Tentang Keluarga Berencana	60
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran – saran	67

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

LAMPIRAN – LAMPIRAN.

BAB I

PENDAHULUAN

Pada alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dapat ditemui Tujuan Nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas maka Pemerintah senantiasa mengadakan beberapa perbaikan-perbaikan program pembangunan, yang dapat diharapkan mampu mewujudkan tujuan nasional tersebut. Hakikat Pembangunan nasional adalah membangun masyarakat Indonesia seutuhnya, yang dapat berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan taraf hidup ke tingkat yang lebih baik dengan segala aspek kehidupan lahir dan batin.

Dalam melaksanakan pembangunan tersebut, faktor penduduk selain merupakan modal dasar juga merupakan faktor dominan yang dapat menjaga keselarasan dan keseimbangan kehidupan politik, sosial, budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan. Dengan demikian pembangunan kependudukan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari program pembangunan nasional bangsa Indonesia, sehingga dalam hal ini faktor pertumbuhan penduduk yang sangat pesat adalah salah satu masalah nasional yang patut untuk segera diperhatikan. Karena pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dapat menghambat program pembangunan itu sendiri.

Akibat yang dapat ditimbulkan dengan pertumbuhan penduduk yang pesat tersebut, akan menimbulkan bertambahnya jumlah pengangguran, sebagai akibat dari kurangnya fasilitas penampungan tenaga kerja, sehingga dengan sendirinya akan menimbulkan angka kemiskinan yang bertepanjang dan mengakibatkan keadaan kesehatan yang kurang meyakinkan dan akibat-akibat yang lainnya.

Untuk itulah maka Pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara melaksanakan fungsinya, dalam hal ini menurut Prof. DR. MR. Prajudi Atmosudirjo mengatakan : Administrasi negara menjalankan (administrasi), menjalankan tugas administrasi (administrasi beschikking) yang bersifat individual, kasual, faktual, teknis penyelenggaraan, dan tindakan administratif yang bersifat organisasional, informasional (tata usaha) atau operasional.¹

Selubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Indonesia telah memprogramkan dan memperkenalkan Keluarga Berencana (KB), sebab program ini tidak terlepas dari Pembangunan Nasional Indonesia, dimana program keluarga berencana diletakan kepada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Indonesia yang selalu disingkat dengan sebutan BKKBN, adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

¹ Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, PN Ghalia, 1981, hal 17.

A. Pengertian dan Penegasan Judul.

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pengertian dan penegasan judul merupakan pencerminan daripada isi uraian materi secara menyeluruh, karena judul tidak saja merupakan kalimat singkat dan terang akan tetapi lebih dari itu. Judul merupakan inti pokok dari semua uraian yang dibagi atas beberapa bab, selanjutnya bab-bab tersebut dibagi pula dalam beberapa sub bab, yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan mata rantai yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula halnya dengan judul skripsi ini yaitu :

Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Peranan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Sesuai Dengan Keppres No. 64 Tahun 1983 (Study Kasus Pada Kantor BKKBN Kota Medan).

- Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat; memeriksa untuk memahami dan sebagainya.²
- Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugas atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertindak laku dalam melaksanakan tugas-tugasnya.³

²Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, PN Balai Pustaka Jakarta, 1995. hal 1060.

³JCT. Simorangkir, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta 1983. hal 78.

- Peranan kedudukan seseorang berdasarkan ketentuan yang berlaku.⁴
- Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Pasal 2 Keppres No. 64 Tahun 1983).
- Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat adalah suatu upaya untuk mewujudkan Tujuan Nasional yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
- Keppres No. 64 Tahun 1983 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1983.

Dari keseluruhan pengertian kalimat-kalimat yang ada pada judul tersebut maka dapat dirangkum pengetiannya adalah mempelajari dengan cermat sesuai dengan aturan hukum, bagaimana penguasa tersebut menjalankan tugas-tugasnya kedudukan lembaga non departemen yang mengurus program keluarga berencana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

B. Alasan Pemilihan Judul.

Dalam mengusahakan untuk dapat mengurangi angka kelahiran dan juga mengurangi jumlah kematian ibu melahirkan, maka Pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan bagi ibu-ibu pasangan usia subur, sebab dengan melalui program Keluarga Berencana (KB) diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

⁴ Depdikbud, Op cit, hal 172.

Dengan meningkatnya kesejahteraan keluarga masing-masing peserta keluarga berencana maka dengan sendirinya dapat meningkatkan kesejahteraan Rakyat Indonesia secara keseluruhan. Meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia merupakan Tujuan Nasional yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, tujuan tersebut adalah merupakan kewajiban Pemerintah untuk dapat mewujudkannya.

Agar dapat tercapai tujuan-tujuan yang dimaksud maka Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 64 Tahun 1983 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, diharapkan mampu mewujudkan Tujuan Nasional yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut.

Sehingga untuk dapat menjamin tingkat kesejahteraan rakyat yang memadai, dipandang perlu mempercepat penurunan tingkat kelahiran agar lebih menggiatkan dan mengefektifkan koordinasi dan pengikutsertaan unsur-unsur yang bersangkutan di kalangan masyarakat maupun Pemerintah ke arah terwujudnya sasaran yang ditetapkan dalam program pembangunan nasional.

Sehingga dengan pengendalian pertumbuhan penduduk di Indonesia maka akan lebih mudah untuk mewujudkan tujuan tersebut, kemudian tingkat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak dapat lebih terjamin.

C. P e r m a s a l a h a n .

Pada masa sekarang ini terlihat berbagai masalah yang timbul sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang sangat pesat menuntut penyediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, perumahan dan kesehatan. Apabila pertumbuhan penduduk

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990.
2. Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Pembuatannya*, Rineka Cipta, 1997.
3. Amrah Muslimin, *Beberapa Azas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985.
4. Aleng Syarifuddin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Desa*, Penerbit Tasito, Bandung, 1987.
5. Bachsan Mustafa, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1984.
6. BKKBN Sumatera Utara, *Program Kependudukan Keluarga Berencana Daerah Propinsi Sumatera Utara*, Medan 1994.
7. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, edisi kedua, 1995.
8. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
9. Kansil CST, *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1984.
10. Muchtar Abdullah, *Hakekat dan Sejarah Keluarga Berencana*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1993.

11. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, PN. Ghalia, Jakarta, 1981.
12. Poerwadarminta WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
13. Simorangkir ICT, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
14. Srihartini P. Pandi, *Masalah Kependudukan dan Pendidikan Kependudukan*, 1983.
15. Utrecht. E, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, cet keempat, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Pajajaran, 1960.